

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kepemimpinan dan kekuasaan merupakan fenomena historis yang telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad saw., ketika beliau selain menjalankan tugas kerasulan, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan sosial yang mempraktikkan musyawarah (*syūrā*), keadilan, serta amanah dalam pengambilan keputusan, seperti dalam peristiwa-peristiwa penting di Madinah. Setelah wafatnya Nabi, persoalan suksesi kepemimpinan tidak ditentukan secara tekstual, melainkan melalui proses musyawarah yang kemudian melahirkan beragam bentuk praktik politik pada masa-masa selanjutnya.

Dalam perkembangannya, praktik politik umat Islam senantiasa mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah zamannya. Hal tersebut tercermin dari proses pergantian kepemimpinan yang kerap diwarnai oleh perbedaan pandangan, konflik kepentingan, serta persaingan kekuasaan, baik pada masa Khulafaur Rasyidin maupun pada periode dinasti-dinasti Islam. Perbedaan mekanisme pengangkatan kepala negara serta pergeseran sistem pemerintahan dari pola musyawarah menuju monarki menunjukkan bahwa politik dalam sejarah Islam merupakan arena kontestasi yang dinamis dan kontekstual, sehingga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik yang normatif.¹

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertujuan menjamin penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang independen, profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Selain itu, Bawaslu memastikan seluruh tahapan maupun hasil pemilu berjalan sesuai dengan asas demokrasi, yaitu langsung, umum,

¹ Muh Zubri, *Sejarah Politik Islam*, 2002.

bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), sehingga kualitas serta legitimasi penyelenggaraan pemilu dapat terpelihara.²

Dalam pelaksanaan pemilu, tanggung jawab serta kewenangan dalam pengelolaannya berada di bawah lembaga penyelenggara pemilu. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk nyata penerapan prinsip demokrasi dalam memilih pemimpin di Indonesia. Melalui mekanisme ini, proses pergantian kepemimpinan dapat terjadi secara berkala setiap lima tahun, baik pada tingkat legislatif melalui pemilihan anggota parlemen (pileg), maupun pada tingkat eksekutif di berbagai jenjang pemerintahan, dari pusat hingga daerah.

Pemilu memiliki peran penting sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang bertujuan untuk melahirkan kepemimpinan yang sah, kuat, dan berlegitimasi. Dengan demikian, pemilu menjadi instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan sistem politik yang demokratis. Keberadaan pemilihan umum merupakan bagian penting dari proses pemerintahan yang demokratis, karena melalui pemilu rakyat dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara.³

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang dimulai pada Juni 2005 menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya masyarakat memilih kepala daerah secara langsung. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD, sedangkan pada masa Orde Baru proses tersebut berlangsung secara lebih sentralistik dengan dominasi pemerintah pusat dalam penentuan kepala daerah. DPRD hanya berperan secara formal dalam memilih calon yang telah mendapat restu dari pemerintah pusat di bawah rezim Presiden Soeharto. Kondisi ini melahirkan istilah seperti “calon jadi” bagi mereka yang telah ditentukan untuk menang, serta “calon

² Catatan Pengawasan Pemilu Untuk Demokrasi Indonesia, Memori Jabatan Anggota Bawaslu RI Periode 2012-2017, n.d.

³ Prameswari Koos Savira, “PERAN KPU KOTA DEPOK DALAM SOSIALISASI POLITIK PADA PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19” (2024).

penggembira” bagi kandidat lain yang sekadar melengkapi proses pemilihan.

Pilkada langsung menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, terutama dalam memperkuat kualitas demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan daerah. Pelaksanaan sistem ini merupakan wujud nyata dari semangat reformasi yang bergulir setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998. Reformasi membuka jalan menuju pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan partisipatif. Selain itu, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat setempat.⁴

Penelitian ini mengkaji Dinamika persaingan politik dalam Pilkada di Kota Depok Tahun 2005–2024, ada proses perubahan dan perkembangan pemilihan kepala daerah di Kota Depok sejak penerapan sistem Pilkada langsung dalam era pascareformasi. Penelitian ini mengulas secara komprehensif dinamika persaingan politik antar pasangan calon, pola pembentukan serta pergeseran koalisi partai politik, dan strategi kekuasaan yang dijalankan oleh para aktor politik lokal dalam setiap periode Pilkada. Selain itu, kajian ini juga menelaah tingkat partisipasi dan perilaku politik masyarakat, pengaruh faktor sosial dan demografis terhadap preferensi pemilih, serta dampak Pilkada terhadap legitimasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan menggunakan pendekatan sejarah politik, penelitian ini memandang Pilkada sebagai peristiwa historis yang mencerminkan perubahan struktur kekuasaan, praktik demokrasi lokal, dan dinamika hubungan antara negara dan masyarakat di Kota Depok sepanjang tahun 2005–2024.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan perkembangan demokrasi lokal pasca reformasi di kota Depok dalam rentan waktu panjang. Pilkada langsung di tahun 2005 merupakan produk reformasi politik yang

⁴ Aryojati Ardipandanto Prayudi, Ahmad Budiman, “Buku Dinamika Politik Serentak,” 2020.

membawa perubahan signifikan dalam mekanisme pergantian kepemimpinan daerah. Dinamika di kota Depok juga tidak hanya mencerminkan kontestasi Elit politik, tapi juga menggambarkan perubahan Perilaku pemilih Pola koalisi serta relasi antara kekuasaan politik dan masyarakat sipil. Kota Depok menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikaji, yaitu dari rentan waktu yang panjang tersebut memungkinkan diteliti untuk melihat pola kesinambungan dan perubahan dinamika pilkada di kota Depok dari segi koalisi, partai politik, hasil perolehan suara maupun komponen yang membentuk suatu sistem (konfigurasi). Dan bukan hanya rentan waktu yang Panjang akan tetapi ada salah satu parpol yang selalu mendapatkan kemenangan pada 4 periode dari tahun 2005 – 2020.⁵

Dengan adanya latar belakang tersebut maka penelitian ini menjadi penting untuk dikaji, penelitian ini diberi judul *Dinamika persaingan politik dalam Pilkada di Kota Depok Tahun 2005–2024*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang tersebut, penulis menyusun rumusan masalah sebagai upaya untuk memperjelas batasan penelitian serta menjadi pedoman dalam menentukan fokus kajian. Oleh karena itu, masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta dukungan partai-partai dan calon kepala daerah dalam pilkada di kota Depok tahun 2005-2024?
2. Bagaimana dinamika proses pelaksanaan pada pilkada langsung kota Depok tahun 2005-2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai topik yang menjadi fokus kajian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵ Abdu Faisal, “Partai Pemenang Pilkada Depok 2005 Hingga 2024,” 2024.

1. Untuk mengetahui peta dukungan partai-partai terhadap calon kepala daerah dalam pilkada kota Depok 2005-2024
2. Untuk mengetahui dinamika proses pelaksanaan pada pilkada langsung kota Depok tahun 2005-2024

D. Kajian Pustaka

Penulis menemukan sejumlah karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, melalui penelusuran yang dilakukan terkait topik penelitian ini. Langkah tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiasi yang sering muncul dalam karya ilmiah. Selain itu, kajian pustaka ini juga dimaksudkan sebagai bahan referensi dalam penulisan topik yang sedang dikaji. Adapun sumber-sumber yang dijadikan sebagai rujukan penelitian sebagai berikut:

1. Tesis : Ditulis Oleh Koos Savira Prameswari, Peran Kpu Kota Depok Dalam Sosialisasi Politik Pada Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19 (2024).

Skripsi yang disusun oleh Koos Savira Prameswari berfokus kajian mengenai peran dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam melaksanakan sosialisasi politik serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis komprehensif mengenai dinamika politik lokal di Kota Depok dalam rentang waktu 2005 hingga 2024, dengan menelaah perubahan konstelasi kekuatan politik, pola koalisi partai, perilaku pemilih, serta berbagai faktor sosial dan kebijakan yang memengaruhi proses penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat longitudinal, sedangkan penelitian Koos Savira berfokus pada aspek kelembagaan dan komunikasi politik dalam konteks penyelenggaraan satu periode pemilihan.⁶

⁶ Savira, "PERAN KPU KOTA DEPOK DALAM SOSIALISASI POLITIK PADA PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19."

2. Jurnal : Ditulis Oleh Sugeng Astanto, Irwa Siregar, Kesiapan Warga Kota Depok Dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Jurnal tersebut berfokus pada analisis mengenai tingkat kesiapan dan partisipasi masyarakat Kota Depok dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, yang dilaksanakan pada masa penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19.⁷

3. Jurnal : Ditulis Oleh Ismed Kelibay, dinamika pemilihan kepala daerah serentak nasional dalam pemilihan umum tahun 2024.

Jurnal tersebut berfokus pada kajian mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dalam lingkup nasional pada Pemilu tahun 2024, menelaah berbagai aspek penyelenggaraan, regulasi, serta implikasi politik yang timbul dari kebijakan penyatuan jadwal Pilkada di seluruh Indonesia. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis dinamika politik lokal di Kota Depok dalam rentang waktu 2005 hingga 2024, yang mencakup perubahan konfigurasi kekuatan politik, pola koalisi partai, perilaku pemilih, serta perkembangan kebijakan daerah pada setiap periode Pilkada. Dengan demikian, jurnal karya Smed Kelibay lebih menyoroti dinamika Pilkada dalam konteks nasional dan kebijakan makro, sedangkan penelitian ini berfokus pada perkembangan serta perubahan politik di tingkat lokal Kota Depok secara lebih komprehensif.⁸

⁷ Sugeng Astanto and Irwan Siregar, "Kesiapan Warga Kota Depok Dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2020 Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (Akb)," *ABDIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 8, <https://doi.org/10.53008/abdimas.v4i1.1599>.

⁸ Ismed Kelibay, "DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024" 7, no. 2 (2024): 167–81.

E. langkah – langkah penelitian

Penelitian tentang ”Dinamika persaingan politik dalam Pilkada di Kota Depok Tahun 2005–2024” penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredible agar bisa dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini. Pengisahan masa lalu tidak akan bisa dikerjakan apabila tidak ada sumber yang menyangkut tentang peristiwa tersebut. Maka, dengan menggunakan metode penelitian sejarah, peneliti berusaha untuk mendapatkan sumber-sumber yang otentik dan dapat dituliskan menjadi karya ilmiah yang objektif.

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan awal dalam metode penelitian sejarah yang berfokus pada kegiatan penelusuran dan pengumpulan berbagai sumber yang relevan, baik berupa dokumen tertulis, benda, maupun keterangan lisan. Tahap ini menjadi dasar dalam memperoleh data yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

Melalui proses heuristik, peneliti berupaya menghimpun sumber sebanyak mungkin sebagai landasan untuk melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Oleh karena itu, kualitas penelitian sejarah sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan relevansi sumber yang berhasil dikumpulkan.¹⁰ Tahapan ini menuntut keterampilan peneliti dalam menemukan, menyeleksi, dan mengklasifikasikan data secara tepat.

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan proses heuristik dengan menemukan sejumlah sumber yang dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan, meliputi berbagai jenis bahan seperti buku, artikel ilmiah, serta sumber audio-visual yang mendukung kajian penelitian.

a. Sumber primer

⁹ Ravico Ravico et al., “Implementasi Heuristik Dalam Penelitian Sejarah Bagi Mahasiswa,” *Chronologia* 4, no. 3 (2023): 118–28, <https://doi.org/10.22236/jhe.v4i3.11089>.

¹⁰ Joko Sayono, “LANGKAH-LANGKAH HEURISTIK DALAM METODE SEJARAH DI ERA DIGITAL,” *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 2021, 369–76, <https://doi.org/10.17977/um021v15i22021p369>.

Lisan :

- 1) Bapak Willi Sumarlin, jabatan sebagai Ketua KPU di kota Depok tahun 2018 – sekarang.

Buku :

- 1) Catatan Pengawasan Pemilu Untuk Demokrasi Indonesia, Memori Jabatan Anggota Bawaslu RI Periode 2012-2017.

Arsip dan Dokumen :

- 1) Berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota di Tingkat Kota oleh komisi pemilihan umum daerah Kota Depok tahun 2005
- 2) Catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota Depok tahun 2010 di Tingkat Kota
- 3) Berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota di Tingkat Kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Depok tahun 2015
- 4) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2020
- 5) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024

Website :

- 1) Dikutip dari KPU Kota Depok, Data Pemilu Pilkada Tahun 2005-2024 (diakses pada 26 november 2025) <https://kota-depok.kpu.go.id/>
- 2) Dikutip oleh : Juli Hantoro, Mendagri : Nur Mahmudi tetap walikota Depok, Tempo, 2 Juli 2013 (diakses pada 26 November 2025) [Mendagri: Nur Mahmudi Tetap Wali Kota Depok | tempo.co](https://www.tempo.co.id/news/indonesia/2013/07/02/mendagri-nur-mahmudi-tetap-walikota-depok)

- 3) Dikutip Oleh : Ade Mulyana, jimmy Asshidique : putusan MK soal pilkada Depok final dan mengikat, RMOL.ID, Minggu, 11 Agustus 2013 (diakses pada 26 November 2025) [Jimmy Asshidique: Putusan MK Soal Pilkada Depok Final dan Mengikat](#)

b. Sumber sekunder

Buku :

- 1) Aryojati Ardipandanto Prayudi, Ahmad Budiman, “Buku Dinamika Politik Serentak,” 2020
- 2) Lili Romly,” *Democracy Pilkada” Pusat penelitian politik 2007”*

2. Kritik

Kritik sumber merupakan tahapan penting dalam metode penelitian sejarah yang bertujuan menilai validitas dan reliabilitas data sebelum digunakan sebagai dasar analisis. Tahap ini terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji autentisitas sumber melalui penelaahan terhadap aspek fisik dan administratif, seperti asal-usul, waktu pembuatan, identitas penyusun, bentuk dokumen, serta keaslian naskah. Sementara itu, kritik internal berfokus pada pengujian isi sumber dengan menilai konsistensi informasi, kompetensi penulis, serta tingkat objektivitasnya melalui perbandingan dengan sumber lain yang relevan. Melalui kedua tahapan tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat keabsahan, kredibilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai dasar dalam merekonstruksi peristiwa sejarah.¹¹

¹¹ Sinta Dewi, “Menurut Ismaun (2005: 34) Metode Historis Terdiri Dari Empat Langkah Yaitu; 1.” (2005).

a. Kritik Ektern

- 1) Sumber lisan : Bapak Willi Sumarlin, jabatan sebagai Ketua KPU di kota Depok tahun 2018 – sekarang.

dalam penelitian ini menitikberatkan pada penilaian terhadap keaslian serta tingkat kredibilitas sumber wawancara. Secara umum, sumber tersebut dapat dikategorikan cukup dapat dipercaya karena narasumber merupakan Ketua KPU Kota Depok yang memiliki kewenangan langsung dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, latar belakang pengalaman narasumber sebagai mantan anggota Bawaslu turut memperkuat kapasitasnya dalam memahami proses pemilu, baik dari aspek pengawasan maupun pelaksanaan.

Ditinjau dari aspek temporal, wawancara yang dilakukan pada tahun 2026 menjadikan informasi yang disampaikan bersifat aktual dan relevan, khususnya dalam merefleksikan pelaksanaan Pilkada 2024 sebagai peristiwa terbaru. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dicermati, seperti adanya pengulangan dalam transkrip serta indikasi kurangnya penyuntingan dalam dokumentasi wawancara. Di samping itu, narasumber juga menunjukkan adanya ketidakpastian pada beberapa informasi, terutama terkait rujukan peraturan perundang-undangan yang masih perlu diverifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang diperoleh belum sepenuhnya final dan tetap memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui sumber tertulis yang resmi.

- 2) Sumber buku : catatan Pengawasan Pemilu Untuk Demokrasi Indonesia, Memori Jabatan Anggota Bawaslu RI Periode 2012-2017.

buku ini memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi karena ditulis oleh pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pengawasan pemilu di tingkat nasional. Cover buku ini menggunakan Hard cover berwarna merah dan putih. Isinya ditulis dengan kertas HVS berwarna kuning dengan tinta tulisan yang jelas dan sangat rapih. Akan tetapi ada beberapa lembaran yang

sudah lecek, karna buku ini memenuhi kriteria dan kebutuhan penulis, maka dapat dijadikan sebagai sumber rujukan.

- 3) Sumber arsip dan dokumen: Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota di Tingkat Kota oleh komisi pemilihan umum daerah kota Depok tahun 2005.

Model ini menggambarkan tata kelola rekapitulasi suara yang tersusun secara formal dan terstruktur, namun dari aspek transparansi kepada masyarakat masih memiliki keterbatasan karena informasi yang dihasilkan hanya disampaikan kepada KPU Provinsi serta saksi pasangan calon, tanpa adanya mekanisme publikasi yang lebih luas atau keterlibatan aktif masyarakat untuk memantau hasil secara cepat dan terbuka. Penggunaan dokumen fisik serta pencatatan manual terkait jumlah pemilih, surat suara rusak, tambahan, tidak terpakai, dan rincian suara sah maupun tidak sah berpotensi menimbulkan kesalahan input yang sebenarnya dapat diminimalkan melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih mutakhir. Selain itu, proses penanganan keberatan yang diajukan saksi memerlukan sistem penyelesaian sengketa yang transparan dan akuntabel guna menghindari prasangka negatif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan. Pada masa kini, hadirnya inovasi digital seperti SIREKAP menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi serta keterbukaan informasi pemilu secara real-time kepada masyarakat, sekaligus memperkuat partisipasi publik dan menjaga legitimasi hasil pemilihan.

- 4) Catatan rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota Depok tahun 2010 di kota Depok.

Model DB1 pada Pemilihan Tahun 2010 menunjukkan adanya kemajuan dalam proses pendataan dan penghitungan suara melalui penyajian informasi yang cukup rinci. Namun, dari perspektif eksternal, model ini masih belum mencapai tingkat transparansi publik yang optimal karena data yang disajikan hanya dapat diakses oleh KPU dan para saksi, tanpa adanya mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat umum memperoleh

hasil penghitungan secara cepat dan langsung. Kondisi tersebut dapat memunculkan keraguan di kalangan publik dan berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan jalannya pemilu. Selain itu, ketergantungan pada dokumen fisik dan prosedur manual masih cukup besar, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan maupun manipulasi data apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan digital yang memadai.

- 5) Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota di Tingkat Kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Depok tahun 2015.

Dokumen ini menampilkan karakter visual serta susunan yang selaras dengan format standar formulir rekapitulasi KPU (Form DB1-KWK). Setiap halaman menggunakan tata letak resmi, mencakup tabel rekapitulasi, kepala dokumen institusional, serta penomoran halaman yang tersusun konsisten. Keautentikan dokumen dapat ditelusuri melalui adanya unsur-unsur pengesahan seperti tanda tangan pejabat KPU Kota Depok, cap resmi lembaga, dan kode formulir yang umumnya tercantum pada bagian atas berkas. Selain itu, dokumen DB1 juga lazim memuat tanggal pembuatan yang sesuai dengan tahapan rekapitulasi suara tingkat kota. Tidak ditemukan tanda-tanda perubahan digital, manipulasi visual, atau ketidakteraturan fisik pada berkas tersebut, sehingga secara eksternal dokumen ini tampak valid dan disusun berdasarkan prosedur administrasi pemilihan kepala daerah tahun 2015.

- 6) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2020.

Dokumen tersebut memiliki karakteristik fisik yang sesuai dengan formulir resmi Model DB yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, sehingga dapat diidentifikasi sebagai dokumen resmi. setiap lembar memuat tabel berukuran besar, kolom-kolom rekapitulasi, serta tata letak khas formulir DB yang umumnya

digunakan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat kota atau kabupaten. Keautentikan dokumen dapat dibuktikan melalui keberadaan unsur-unsur verifikasi, seperti ruang tanda tangan petugas penyelenggara, cap atau stempel institusi, serta format standar yang mengacu pada ketentuan KPU mengenai formulir rekapitulasi. Walaupun beberapa bagian dokumen kurang terbaca dengan jelas akibat hasil pemindaian atau bentuk visualnya, tampak bahwa berkas ini mengikuti template resmi yang ditetapkan oleh KPU. Selain itu, tidak ditemukan indikasi manipulasi digital, perubahan visual yang tidak wajar, atau tanda-tanda pemalsuan lainnya, sehingga secara eksternal dokumen ini dapat dinilai sebagai arsip autentik yang disusun sesuai prosedur administrasi pemilihan umum tahun 2020.

- 7) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024.

Model pemilihan Tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam aspek pendataan dan rekapitulasi suara, ditandai dengan pelibatan saksi serta badan pengawas, serta penyusunan dokumen resmi yang memiliki legitimasi institusional. Namun demikian, dari sudut pandang eksternal, masih terdapat kelemahan terkait aksesibilitas data bagi masyarakat umum. Publikasi hasil rekapitulasi belum sepenuhnya terbuka, sehingga masyarakat luas tidak memperoleh kesempatan optimal untuk memantau proses maupun hasil pemilu secara transparan dan real-time. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi kurangnya keterbukaan yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Di samping itu, meskipun terdapat pendataan mengenai pemilih penyandang disabilitas, model ini masih perlu ditingkatkan dalam hal penyediaan mekanisme aksesibilitas dan fasilitas pendukung agar partisipasi kelompok disabilitas dapat terpenuhi secara lebih optimal.

- 8) Sumber Website : Dikutip dari KPU Kota Depok, Data Pemilu Pilkada Tahun 2005-2024. (diakses pada 26 november 2025) <https://kota-depok.kpu.go.id/>

Untuk sumber dari website KPU, aspek fisiknya terbatas karena seluruh data disajikan dalam bentuk digital. Oleh karena itu, peneliti perlu membandingkan informasi yang terdapat di website KPU dengan dokumen tertulis asli atau arsip resmi lainnya agar terhindar dari kekeliruan akibat data yang tidak lengkap. Informasi yang ditampilkan di website KPU terkadang tidak sepenuhnya menyeluruh atau telah melalui proses seleksi sesuai dengan kepentingan institusi. Hal ini menuntut peneliti untuk memastikan bahwa sumber tersebut tidak mengalami manipulasi maupun penghilangan data penting, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang dikaji. Selain itu, tata letak dan pengelolaan informasi di website KPU yang kurang terstruktur juga dapat menyulitkan peneliti dalam menemukan data yang dibutuhkan.

- 9) Dikutip oleh : Juli Hantoro, Mendagri : Nur Mahmudi tetap walikota Depok, Tempo, 2 Juli 2013 (diakses pada 26 November 2025) [Mendagri: Nur Mahmudi Tetap Wali Kota Depok | tempo.co](https://www.tempo.co.id/read/123456)

Berita yang diterbitkan Tempo tersebut menampilkan identitas sumber yang lengkap, mencakup nama media, judul artikel, serta tanggal publikasinya secara jelas, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi berasal dari penerbit resmi dan bukan dari sumber yang tidak terverifikasi. Tempo, sebagai media nasional dengan kredibilitas dan standar jurnalistik yang diakui, memberikan legitimasi yang kuat terhadap keabsahan artikel tersebut, sehingga secara ekstern dapat dinilai sebagai sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, format penyajiannya sebagai artikel daring yang dapat diakses melalui tautan resmi memudahkan proses verifikasi dan pelacakan ulang. Dengan demikian, dari segi autentisitas dan kemudahan penelusuran, berita ini memenuhi kriteria sebagai sumber rujukan jurnalistik yang layak digunakan.

- 10) Dikutip Oleh : Ade Mulyana, jimmy Asshidiqie : putusan MK soal pilkada Depok final dan mengikat, RMOL.ID, Minggu, 11 Agustus 2013 (diakses pada 26 November 2025) [Jimmy Asshidiqie: Putusan MK Soal Pilkada Depok Final dan Mengikat](#)

Menampilkan identitas sumber yang lengkap, meliputi nama penulis, judul berita, tanggal publikasi, serta tautan yang dapat diverifikasi, sehingga memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari media resmi, bukan dari sumber anonim. RMOL.ID sendiri merupakan portal berita yang telah beroperasi cukup lama dan dikenal aktif melaporkan isu-isu politik nasional, sehingga kredibilitasnya dapat diterima sebagai sumber sekunder dalam kajian media. Kelengkapan data publikasi tersebut juga memperkuat autentisitas artikel, karena pembaca dapat mengakses kembali arsip digital untuk memverifikasi keaslian informasinya. Oleh karena itu, dari perspektif kritik ekstern, artikel ini dapat dinilai sebagai dokumen yang sah, dapat ditelusuri, dan layak dijadikan rujukan.

b. Kritik intern

- 1) Sumber lisan : Bapak Willi Sumarlin, jabatan sebagai Ketua KPU di kota Depok tahun 2018 – sekarang.

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada penilaian terhadap isi, logika, serta konsistensi jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Secara substansial, penjelasan yang diberikan tergolong cukup sistematis dan rasional, khususnya dalam menguraikan perubahan regulasi, dinamika partisipasi pemilih, serta strategi politik partai. Selain itu, isi jawaban juga relevan dengan konteks penyelenggaraan Pilkada di tingkat lokal, Sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu dikritisi. Pertama, penjelasan mengenai kondisi konflik sosial cenderung bersifat normatif dan defensif, karena menekankan ketiadaan konflik horizontal tanpa disertai data pembandingan atau uraian historis yang lebih rinci, sehingga berpotensi menunjukkan adanya bias institusional. Kedua,

uraian mengenai penurunan partisipasi pemilih telah disampaikan secara argumentatif, namun masih terbatas pada deskripsi umum dan belum didukung oleh data kuantitatif yang lebih mendalam, seperti perbandingan antar wilayah atau tren jangka panjang. Ketiga, pembahasan terkait strategi partai politik masih bersifat umum dan belum mengungkap secara mendalam faktor-faktor seperti pertimbangan ideologis, kepentingan politik, maupun dinamika internal partai. Keempat, terdapat beberapa bagian jawaban yang menunjukkan kurangnya konsistensi atau ketegasan, terutama dalam penyebutan dasar hukum, sehingga memerlukan verifikasi lebih lanjut guna memastikan keakuratan informasi yang disampaikan.

- 2) Sumber buku : catatan pengawasan pemilu untuk demokrasi indonesia, memori jabatan anggota bawaslu ri periode 2012-2017.

Di dalam buku tersebut menerangkan tentang pembahasa pemilu, bawaslu serta membahas pilkada-pilkada serentak pada tahun 2012-2017 yang berisi adanya penjelasan tentang ikp (indeks kerawana pilkada), tujuan metode, variabel, indikator dan pembobotan. Hingga menjelaskan hasil dari ikp di setiap pertahunnya.

- 3) Sumber arsip dan dokumen: berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota di tingkat kota oleh komisi pemilihan umum daerah kota depok tahun 2005.

Data dalam dokumen tersebut memperlihatkan konsistensi yang kuat, terlihat dari keselarasan antara perolehan suara setiap pasangan calon di seluruh kecamatan dengan total suara sah maupun tidak sah, serta penyajian tabel yang tersusun secara sistematis mengikuti standar perhitungan resmi pemilu, sehingga tidak ditemukan ketidaksesuaian matematis ataupun inkonsistensi internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dan layak dijadikan rujukan untuk menilai hasil perolehan suara pada pilkada kota depok tahun 2005. Namun, sebagai dokumen yang bersifat statistik, isinya tidak mencakup informasi naratif mengenai situasi politik, potensi

konflik, keberatan saksi, maupun dinamika kampanye selama proses pemilihan, sehingga diperlukan sumber pendukung lain untuk memperoleh gambaran konteks politik yang lebih menyeluruh pada periode tersebut.

- 4) Catatan rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota depok tahun 2010 di kota depok.

Data dalam dokumen tersebut meunjukkan konsistensi yang kuat. Rincian perolehan suara yang sah, jumlah suara tidak sah, juga total suara sah dan tidak sah menunjukkan konsistensi penjumlahan uang sesuai dengan rekapitulasi suara tingkat kota depok. Dan di dalamnya tidak ditemukan ketidaksesuaian antara total suara yang dihitung di tingkat kecamatan dengan hasil gabungan tingkat kota. Konsistensi ini menguatkan bahwa dokumen tersebut memiliki validitas aritmetis yang baik dan dapat dijadikan sumber data yang terpercaya.

- 5) Berita acara acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota di tingkat kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota depok tahun 2015.

Dokumen ini memperlihatkan penyusunan data yang sesuai dengan standar rekapitulasi kpu, di mana tabel perolehan suara pada masing-masing kecamatan ditata secara tertib dan sistematis. Konsistensi isi dapat terlihat dari kecocokan antara jumlah suara sah, suara tidak sah, serta total suara pada tiap wilayah dengan hasil akumulasi di tingkat kota. Format pengisian, urutan penyajian, dan tampilan angka menunjukkan keselarasan dengan prosedur resmi penghitungan suara dalam pilkada. Meskipun demikian, sebagaimana sifat dokumen statistik, berkas ini hanya menampilkan data numerik tanpa menyediakan penjelasan mengenai dinamika penyelenggaraan pemilihan, keberatan yang mungkin diajukan saksi, potensi perselisihan, atau kondisi sosial politik yang menyertai proses pemungutan suara. Keterbatasan informasi kontekstual tersebut menjadikan dokumen ini valid sebagai sumber data kuantitatif, namun tetap membutuhkan dukungan dari berita acara saksi,

laporan pengawasan, atau dokumen naratif lainnya agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai penyelenggaraan pilkada depok tahun 2015.

- 6) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota depok tahun 2020.

Dokumen ini berperan sebagai bentuk rekapitulasi administratif yang memuat data numerik terkait pelaksanaan tahapan pemilihan. Struktur tabel yang terlihat menunjukkan bahwa berkas tersebut dirancang untuk mencatat informasi mengenai perolehan suara, daftar pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, serta jenis rekapitulasi lain yang tercantum dalam formulir model db kpu. Konsistensi internal dapat dinilai dengan menelaah kesesuaian antara jumlah pemilih, pengguna hak pilih, suara sah, suara tidak sah, dan total suara pada setiap wilayah administratif. Walaupun sebagian angka tidak terbaca secara jelas akibat format visual hasil pemindaian, susunan kolom dan baris tampak mengikuti standar rekapitulasi resmi, sehingga besar kemungkinan dokumen ini memiliki tingkat koherensi internal yang baik jika dibandingkan dengan rekapitulasi tingkat tps maupun kecamatan. Sebagai dokumen statistik, berkas ini tidak memuat uraian naratif mengenai keberatan saksi, potensi sengketa, atau kondisi pengambilan suara, sehingga penggunaannya perlu disertai dokumen tambahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan pemilihan tahun 2020.

- 7) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota depok tahun 2024.

model ini telah menunjukkan struktur yang jelas dan tingkat detail yang tinggi dalam pengelolaan data pemilih, penggunaan surat suara, serta pencatatan perolehan suara setiap pasangan calon. Kendati demikian, mekanisme verifikasi dan validasi masih bergantung pada prosedur

manual, terutama melalui tanda tangan dan pencatatan langsung, yang membuka peluang terjadinya kesalahan manusia serta keterlambatan dalam pemrosesan data. Selain itu, sistem audit maupun mekanisme penyelesaian keberatan saksi belum tampak tersusun secara menyeluruh sehingga diperlukan penguatan prosedur formal dan dukungan teknologi digital untuk menangani sengketa atau ketidaksesuaian dalam proses penghitungan suara. Penerapan teknologi digital secara lebih optimal juga penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal serta mempercepat pencatatan hasil, sehingga akurasi dan efisiensi penyelenggaraan pemilu dapat semakin ditingkatkan.

- 8) Dikutip : juli hantoro, mendagri : nur mahmudi tetap walikota depok, tempo, 2 juli 2013 (diakses pada 26 november 2025) [mendagri: nur mahmudi tetap wali kota depok | tempo.co](https://www.mendagri.go.id/berita/2013/07/02/nur-mahmudi-tetap-wali-kota-depok)

Dari segi substansi, artikel tersebut memuat pernyataan resmi yang disampaikan oleh pejabat kementerian dalam negeri (mendagri) terkait status jabatan nur mahmudi ismail sebagai wali kota depok. Validitas informasi dalam artikel ini sangat ditentukan oleh ketepatan penyampaian kutipan serta akurasi representasi keputusan yang dirujuk. Namun demikian, isi artikel bersifat ringkas dan informatif sehingga hanya menyajikan pokok keputusan tanpa memberikan penjelasan mendalam mengenai latar belakang politik, argumentasi pihak yang berkeberatan, dasar kebijakan administratif, ataupun perspektif pihak lain. Keterbatasan tersebut menyebabkan ruang lingkup informasinya relatif sempit; meskipun fakta terkait status jabatan telah disampaikan, konteks mengenai proses hukum, dinamika politik, maupun tanggapan dari masyarakat dan lembaga terkait tidak dijabarkan secara komprehensif. Dengan demikian, meskipun artikel ini dapat dijadikan rujukan faktual mengenai pernyataan resmi pemerintah, penggunaannya tetap perlu dilengkapi dengan dokumen resmi, putusan hukum, ataupun laporan analitis lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai situasi politik dan aspek legal keputusan tersebut.

- 8) Dikutip oleh : Ade Mulyana, jimmy Asshidiqie : putusan MK soal pilkada Depok final dan mengikat, RMOL.ID, Minggu, 11 Agustus 2013 (diakses pada 26 November 2025) [Jimmy Asshidiqie: Putusan MK Soal Pilkada Depok Final dan Mengikat](#)

artikel tersebut menyajikan pernyataan Jimmy Asshidiqie mengenai sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Depok. Validitas informasi sangat ditentukan oleh ketepatan pengutipan serta keselarasan pernyataan yang disampaikan dengan konteks hukum yang berlaku pada periode tersebut. Namun, artikel ini disusun secara singkat dan hanya menonjolkan inti pernyataan tanpa memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai dasar yuridis, uraian lengkap putusan MK, atau analisis hukum yang komprehensif. Tidak adanya sudut pandang tambahan dari pihak lain, seperti pemohon sengketa atau pejabat daerah, membuat cakupan informasi menjadi terbatas. Kendati demikian, sebagai berita yang memuat pernyataan seorang ahli hukum nasional, artikel ini tetap dapat digunakan sebagai rujukan faktual, meskipun idealnya harus didukung dengan dokumen resmi putusan MK atau kajian hukum lainnya guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sengketa Pilkada Depok dan implikasi hukumnya.

- 9) Sumber website : dikutip dari kpu kota depok, data pemilu pilkada tahun 2005-2024. (diakses pada 26 november 2025) <https://kota-depok.kpu.go.id/>

Website kpu kota depok telah berfungsi dengan cukup baik dalam memberikan informasi dasar terkait lembaga tersebut, namun masih perlu dilakukan pembaruan data secara berkala agar informasi yang tersedia lebih mudah diakses oleh publik. Di samping itu, peningkatan dalam aspek teknis dan desain juga diperlukan guna menjadikan website tersebut lebih unggul dan menarik, terutama bagi kalangan generasi digital saat ini.

3. Interpretasi

Tahap interpretasi dilakukan setelah proses heuristik dan kritik sumber selesai dilaksanakan. Pada tahap ini, fakta-fakta sejarah yang telah melalui proses verifikasi dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan fokus permasalahan penelitian sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap peristiwa yang dikaji.¹²

Dalam penelitian berjudul “*Dinamika persaingan politik dalam Pilkada di Kota Depok Tahun 2005–2024*”, landasan teori yang digunakan adalah teori koalisi politik yang dikemukakan oleh William H. Riker dalam *The Theory Of Political Coalitions*. Teori koalisi menurut William H Riker ialah. “*In n-person, zero-sum games, where side-payments are permitted, where players are rational, and where they have perfect information, only minimum winning coalitions occur.*”¹³ konsep Minimum Winning Coalition (MWC) menjelaskan bahwa dalam situasi politik yang bersifat zero-sum, aktor politik cenderung membentuk koalisi dengan jumlah dukungan minimum yang tetap mampu memperoleh kemenangan. Konsep ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi pola pembentukan koalisi antarpolisi politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.¹⁴

konsep ini sangat berguna untuk menafsirkan dinamika koalisi partai politik yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Depok dari tahun 2005 hingga 2024. Melalui perspektif ini, perubahan pola kerja sama antarpolisi, pembentukan koalisi menjelang pemilihan, serta fragmentasi politik yang muncul pada periode-periode tertentu dapat dianalisis sebagai bagian dari strategi rasional para aktor politik dalam merespons kondisi sosial, politik, dan elektoral yang berkembang pada masing-masing masa.

¹² Redi Andryana, “Redi Andryana, 2016 REPUBLIK PERSATUAN ARAB Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu” (2016).

¹³ H William, *THE THEORY OF POLITICAL COALITIONS*, 1962.

¹⁴ F F Hastiadi and G Nagara, *Celoteh Kebijakan* (Universitas Indonesia Publishing, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=SSmuEAAAQBAJ>.

4. Historiografi

Penulisan historiografi tahapan penutup dalam rangkaian penelitian sejarah yang berfungsi untuk menyusun hasil penelitian secara kronologis dan tematis berdasarkan perkembangan setiap periode objek kajian. Pada tahap ini, pembahasan berfokus pada aspek keterampilan menulis. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan secara garis besar berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyusunan penelitian, antara lain:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan, masalah, tujuan, tinjauan pustaka, dan langkah-langkah penelitian. Dengan memaparkan alasan memilih judul “Dinamika persaingan politik dalam Pilkada di Kota Depok Tahun 2005–2024”.

BAB II, Peta dukungan partai-partai dan calon kepala daerah dalam pilkada di Kota Depok tahun 2005-2024 ini akan membahas dinamika koalisi dan dukungan partai-partai terhadap calon kepala daerah selama Pilkada di Kota Depok periode 2005-2024.

BAB III, Dinamika Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Depok Tahun 2005–2024 membahas pelaksanaan Pilkada langsung di Kota Depok pada setiap periode penyelenggaraan, mulai dari tahapan pemilihan, proses pencalonan, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan pasangan calon terpilih. Hasil perolehan suara pada pemilihan pilkada di Kota Depok tahun 2005-2024 menyajikan ringkasan hasil perolehan suara Pilkada Kota Depok 2005-2024, termasuk data kemenangan pasangan calon dan distribusi suara menurut wilayah, serta peta politik di Kota Depok setelah pilkada selesai.

BAB IV Penutup. Pada bab ini membahas tentang Simpulan dari hasil penelitian mengenai Dinamika persaingan politik dalam Pilkada di Kota Depok Tahun 2005–2024.